VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR DI PASAR INPRES KOTA PALU

Muh. Fendy Yuliastono[1], Suasa,[2] Mukarramah[3].

[1] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
fendhymuhammad01@gmail.com
[2] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
suasafisip@gmail.com
[3] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
mukarramaheka1037@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu yang belum optimal sehingga menimbulkan kebocoran pendapatan serta lemahnya pengawasan terhadap petugas parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu berdasarkan fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kota Palu, petugas parkir, pedagang, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perencanaan, penetapan target pendapatan telah dilakukan, namun implementasinya belum berjalan efektif karena masyarakat tidak selalu menerima karcis resmi. Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas telah ditetapkan namun struktur kerja masih lemah dan tumpang tindih. Pada aspek pengarahan, pembinaan terhadap petugas belum konsisten. Koordinasi antar pihak juga belum maksimal, sedangkan pengendalian masih lemah sehingga membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Secara keseluruhan, manajemen retribusi parkir telah berjalan namun belum efektif, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta penerapan sistem digital untuk mendukung transparansi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.

Kata kunci: Manajemen Publik, Retribusi Parkir, Fungsi Manajemen Henry Fayol, Pengawasan; Transparansi

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study was motivated by the suboptimal management of parking retribution at Inpres Market in Palu City, which has resulted in revenue leakage and weak supervision of parking attendants. The objective of this research is to describe the management of parking retribution at Inpres Market based on the management functions proposed by Henry Fayol, namely planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation involving the Palu City Department of Transportation, parking attendants, traders, and service users. The findings show that, in terms of planning, revenue targets and official parking tickets have been established; however, their implementation remains ineffective, as many users do not receive official tickets. In terms of organizing, task distribution has been arranged, yet overlapping duties and an unclear work structure are still found. The directing aspect has not been carried out consistently, as guidance and supervision for attendants remain limited. Coordination among related stakeholders has not been optimal, while controlling mechanisms are still weak, resulting in potential revenue leakage. Overall, the management of parking retribution at Inpres Market has been implemented, but it has not been effective, thus requiring stronger supervision and the application of a digital-based payment system to improve transparency and increase local revenue.

Keywords: *Public Management, Parking Retribution, Henry Fayol's Management Functions, Supervision, Transparency, Local Revenue.*

Submisi: 06-11-2024
Diterima: 07-11-2024
Dipublikasikan: 14-11-2024

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi dan tata kelola pelayanan publik di wilayah perkotaan. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai lebih dari 157 juta unit pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) kebutuhan akan pengelolaan parkir yang tertib, efisien, dan transparan menjadi semakin mendesak. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi parkir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, retribusi parkir memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara profesional.

Pengelolaan retribusi parkir di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serius, seperti pungutan liar, tidak terbitnya karcis resmi, lemahnya sistem pencatatan, hingga kebocoran pendapatan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Kondisi yang sama terjadi di Kota Palu, di mana kontribusi sektor perparkiran terhadap PAD masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, PAD Kota Palu tercatat sebesar Rp152,4 miliar, namun retribusi parkir hanya menyumbang sekitar Rp1,7 miliar meskipun aktivitas kendaraan sangat tinggi terutama di kawasan strategis seperti pasar tradisional (Badan Keuangan Daerah Kota Palu, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dan realisasi penerimaan yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola.

Pasar Inpres Kota Palu merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di kota tersebut dengan tingkat mobilitas pengunjung yang tinggi dan kebutuhan parkir yang padat. Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2021, tarif parkir resmi telah ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak petugas parkir tidak memberikan karcis resmi, sementara sebagian titik parkir dikuasai oleh petugas yang tidak terdaftar. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kebocoran pendapatan, tetapi juga merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan dan implementasi kebijakan masih belum efektif.

Efektivitas pengelolaan retribusi parkir ditentukan oleh sejauh mana fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik. Henry Fayol (2017) menekankan lima fungsi utama manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Jika salah satu fungsi tidak berjalan optimal, maka keseluruhan proses manajerial akan melemah dan tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Di Pasar Inpres, kelemahan terlihat pada aspek perencanaan berbasis data, pembagian tugas petugas di lapangan, mekanisme pengarahan, koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pengelola pasar, serta pengendalian terhadap pemasukan dan praktik pemungutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana manajemen retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu dilaksanakan, sejauh mana efektivitasnya, serta di mana letak kelemahan dalam penerapan fungsi manajemen. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam

memperbaiki tata kelola perparkiran, meningkatkan transparansi, serta memaksimalkan kontribusi sektor perparkiran terhadap PAD Kota Palu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi aktual pengelolaan retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara natural sesuai konteks lapangan serta memperoleh data yang kaya mengenai proses manajerial, interaksi aktor, dan praktik pemungutan retribusi yang berlangsung.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di kawasan parkir Pasar Inpres serta wawancara mendalam dengan informan yang meliputi pejabat Dinas Perhubungan Kota Palu, Kepala UPT Pasar Inpres, petugas parkir resmi, pedagang, dan pengguna jasa parkir. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti Peraturan Walikota Palu, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laporan UPT pasar, dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pemungutan retribusi parkir dan keteraturan sistem yang berjalan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dari informan kunci. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data terkait regulasi, tarif parkir resmi, dan laporan pendapatan.

Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasi data untuk menjawab fokus penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen agar data yang diperoleh lebih valid dan reliabel..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan lima fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Seluruh data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pasar Inpres Kota Palu serta Dinas Perhubungan Kota Palu.

Hasil Penelitian

1. Perencanaan (*Planning*)

Dinas Perhubungan Kota Palu telah menetapkan target pendapatan retribusi parkir serta menetapkan tarif resmi melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2021, yakni Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Penetapan tarif ini merupakan bagian dari upaya perencanaan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Dinas Perhubungan telah menetapkan titik-titik parkir dan membagi kawasan Pasar Inpres ke dalam beberapa zona layanan.

Namun implementasi perencanaan tersebut masih belum efektif. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa. Ketidakteraturan ini menyebabkan sulitnya pelacakan realisasi pendapatan dan memunculkan dugaan kebocoran retribusi. Selain itu, perencanaan berbasis data belum sepenuhnya diterapkan, terlihat dari tidak adanya pemetaan potensi parkir berdasarkan jumlah kendaraan harian maupun volume kunjungan pasar. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan dalam penetapan target pendapatan dan lemahnya pengendalian di lapangan.

Perencanaan yang tidak ditindaklanjuti dengan prosedur operasional jelas—seperti sistem pencatatan, penggunaan karcis standar, dan alat bantu pengawasan—menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Dampaknya adalah tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Secara struktural, Dinas Perhubungan Kota Palu telah memiliki pembagian tugas antara kepala bidang, pengawas lapangan, dan petugas parkir. Pada tingkat UPT Pasar Inpres, kepala unit juga memiliki tugas koordinatif untuk memastikan ketertiban area pasar. Petugas parkir yang ditempatkan pada titik tertentu seharusnya memiliki identitas resmi dan surat penugasan.

Pengorganisasian belum berjalan optimal. Hasil penelitian menemukan bahwa sejumlah petugas parkir tidak memiliki tanda pengenal, tidak tercatat secara administratif, dan tidak mendapatkan penugasan resmi dari dinas. Hal ini menyebabkan tumpang tindih peran antara petugas resmi dan petugas nonresmi (sering disebut juru parkir liar). Kondisi ini berdampak pada tidak pastinya retribusi yang masuk ke kas daerah.

Pembagian tugas tidak diikuti dengan penempatan petugas yang proporsional. Beberapa titik rawan yang padat kendaraan hanya dijaga oleh satu petugas, sementara titik yang kurang ramai justru memiliki lebih dari satu petugas. Ini menunjukkan lemahnya manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi parkir.

3. Pengarahan (*Commanding*)

Fungsi pengarahan bertujuan memberikan bimbingan, instruksi, dan motivasi kepada petugas parkir agar bekerja sesuai aturan. Dalam praktiknya, pengarahan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Perhubungan belum berjalan optimal. Tidak ada briefing rutin sebelum petugas bertugas, tidak ada instruksi tertulis mengenai standar pelayanan, dan petugas jarang mendapatkan evaluasi kinerja.

Petugas parkir juga mengaku hanya menerima pengarahan pada saat awal penempatan tugas. Setelah itu, pengawasan jarang dilakukan sehingga petugas cenderung bekerja berdasarkan kebiasaan dan bukan berdasarkan standar operasional yang jelas. Ketidakjelasan pengarahan ini menyebabkan perilaku petugas tidak seragam ada yang memberikan karcis sesuai ketentuan, namun banyak yang tidak melaksanakannya.

Minimnya motivasi dan penghargaan juga menjadi faktor yang memperlemah semangat kerja petugas. Beberapa petugas menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan pelatihan ataupun pembinaan berkala. Akibatnya, potensi penyimpangan dalam praktik pemungutan retribusi semakin besar.

4. Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi antarinstansi khususnya antara Dinas Perhubungan, pengelola Pasar Inpres, dan petugas lapangan belum berjalan secara terpadu. Masing-masing pihak cenderung bekerja secara terpisah tanpa mekanisme koordinasi rutin. UPT Pasar Inpres, misalnya, lebih fokus pada pengelolaan pedagang dan kebersihan pasar, sementara urusan parkir sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak permasalahan parkir membutuhkan koordinasi bersama, seperti penindakan terhadap petugas liar atau penyusunan zona parkir.

Kurangnya koordinasi juga terlihat pada tidak adanya sistem pelaporan rutin dari petugas parkir kepada pengawas. Banyak petugas bekerja tanpa supervisi langsung, dan ketika terjadi masalah, penanganannya tidak cepat karena tidak ada alur koordinasi yang jelas. Kondisi ini memperburuk ketidakteraturan tata kelola parkir dan membuka peluang penyimpangan.

Koordinasi dengan masyarakat pengguna jasa parkir juga relatif minim. Tidak ada papan informasi mengenai tarif resmi, sehingga banyak pengguna tidak mengetahui besaran tarif yang seharusnya mereka bayar. Hal ini menurunkan transparansi dan akuntabilitas layanan parkir.

5. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian merupakan aspek paling lemah dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum berjalan secara efektif. Pengawasan lapangan hanya dilakukan sesekali, tanpa jadwal yang jelas, dan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Hal ini menyebabkan petugas memiliki peluang besar melakukan penyimpangan seperti tidak memberikan karcis atau menetapkan tarif tidak sesuai aturan.

Belum ada sistem pencatatan atau pelaporan keuangan yang terstandar, baik harian maupun mingguan. Tidak adanya sistem digital membuat proses pengendalian semakin sulit dilakukan. Keberadaan petugas parkir liar semakin memperburuk sistem pengendalian karena retribusi yang dipungut tidak masuk ke kas daerah.

Ketiadaan audit rutin serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran juga melemahkan fungsi pengendalian. Meskipun regulasi sudah tersedia, implementasinya masih lemah sehingga pendapatan retribusi parkir tidak mencapai potensi maksimal.

Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu telah menjalankan seluruh fungsi manajemen Fayol, tetapi masih pada tahap dasar dan belum efektif. Kelemahan paling signifikan terdapat pada fungsi pengorganisasian dan pengendalian, yang berdampak langsung pada kebocoran pendapatan dan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, pemerintah Kota Palu perlu memperkuat struktur organisasi di lapangan, meningkatkan sistem pengawasan, memberikan pelatihan kepada petugas, serta mulai menerapkan sistem digitalisasi retribusi agar proses pemungutan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu, tetapi belum berjalan secara efektif. Pada aspek perencanaan, pemerintah telah menetapkan tarif dan target pendapatan, namun implementasinya tidak optimal karena karcis resmi sering tidak diberikan kepada pengguna jasa. Pengorganisasian petugas parkir belum tertata dengan

baik sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan keberadaan petugas nonresmi. Pengarahan kepada petugas jarang dilakukan dan tidak dibarengi dengan pembinaan maupun evaluasi kinerja yang konsisten. Koordinasi antarinstansi terkait juga masih lemah, mengakibatkan penanganan masalah parkir dan pengawasan lapangan tidak berjalan terpadu. Fungsi pengendalian merupakan aspek paling kritis karena pengawasan dan sistem pelaporan tidak terstruktur, sehingga peluang terjadinya penyimpangan dan kebocoran pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan, serta penerapan digitalisasi retribusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir demi optimalisasi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

DAFTAR PUSTAKA

Badan Keuangan Daerah Kota Palu. (2024). *Laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Palu tahun 2023*. Pemerintah Kota Palu.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik transportasi darat Indonesia 2023*. BPS RI.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. (2024). *Laporan informatif pelayanan parkir Kota Palu*. Pemerintah Kota Palu.

Dinas Perhubungan Kota Palu. (2023). *Dokumen pengelolaan parkir Pasar Inpres Kota Palu*. Dishub Kota Palu.

Fayol, H. (2017). *General and industrial management*. Ravenio Books.

Ismail, M. (2021). Efektivitas pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber PAD daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45–57.

Jamaluddin, M. (2020). Manajemen pelayanan publik pada sektor transportasi. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(2), 122–134.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Statistik pendapatan daerah Indonesia 2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2023*. Kemendagri RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. (2022). Efektivitas pengelolaan retribusi parkir di pasar tradisional. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 233–245.

Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Parkir.

Pratiwi, S. (2021). Koordinasi antarinstansi dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 77–88.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tasirruni. (2025). Optimalisasi retribusi parkir sebagai sumber PAD. *Jurnal Transportasi Publik*, 6(1), 14–27.

Tiara, J. E. (2024). Evaluasi kinerja pelayanan parkir on-street di kawasan perdagangan. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 3(2), 98–112.

TENTANG PENULIS

Muh Fendy Yuliastono merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian manajemen publik, kebijakan publik, dan tata kelola pelayanan umum, khususnya pada isu pengelolaan parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulisan artikel ini merupakan bagian dari penyusunan penelitian skripsi yang berfokus pada manajemen retribusi parkir di Pasar Inpres Kota Palu..